



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP)



**Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone**

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe. Komitmen dalam penyusunan LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Dua Boccoe untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SKPD Kecamatan Dua Boccoe. Adapun

aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SKPD Kecamatan Dua Boccoe pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 8 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Uloe, 2 Februari 2019

Kepala SKPD Kecamatan Dua Boccoe



ANDIN MUSLAM, S.Sos.MM

NIP.19680605 199103 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	11
1.5 Struktur Organisasi	12
1.6 Komposisi SDM Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Visi dan Misi	16
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja	18
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	20
2.5 Program untuk Pencapaian Sasaran	21
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	22
2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.8 Rencana Anggaran Tahun 2018	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32

3.1	Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	33
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	36
3.3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1	36
3.3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2	37
3.3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 1	38
3.3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 2	39
3.3.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.3.6	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	42
3.3.7	Permasalahan dan Alternatif Solusi	51
3.4	Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP		55
LAMPIRAN		57
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018		
	Cascading 2013-2017	58
Daftar Tabel		
Tabel 1.1	Susunan Pegawai Kecamatan Dua Boccoe	13
Tabel 1.2	Komposisi SDM Organisasi	15
Tabel 2.1.3	Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Dua Boccoe	18
Tabel 2.2.4	Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Dua Boccoe	20

Tabel 2.1.5	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2018	23
Tabel 2.2.1	perjanjian Kinerja SKPD Kec.Dua Boccoe Tahun 2018	24
Tabel 2.3.1	IKU SKPD Kecamatan Dua Boccoe	25
Tabel 2.4.1	Rencana Belanja SKPD Kecamatan Dua Boccoe TA 2018	27
Tabel 2.4.2	Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2018	27
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Ordinasri	32
Tabel 3.1.2	Pencapaian Indikator Sasaran	33
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja SKPD Kec.Dua Boccoe Tahun 2018	33
Tabel 3.2.2	Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	35
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	36
Tabel 3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	37
Tabel 3.3.3	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	38
Tabel 3.3.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	39
Tabel 3.3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.3.6	Program dan Kegiatan	42
Tabel 3.3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	46
 Daftar Gambar		
Gambar 1.1	Struktur Organisasi	...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Kecamatan Dua Boccoe LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj SKPD Kecamatan Dua Boccoe merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Dua Boccoe adalah salah satu kecamatan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di sebelah Utara Kota Watampone. Luas wilayah Kecamatan Dua Boccoe Sekitar 144.90 Km² dengan Koordinat Geografis berada 4°17.43” LS dan 120°14’ 38 BT dengan Topografi berada pada lokasi daratan yang suhu sekitar 17-25° celsius dengan jarak tempuh ± 30 Km dari ibu Kota Kabupaten . Kecamatan Dua Boccoe berada pada ketinggian 600-700 m dari permukaan Laut.

Kecamatan Dua Boccoe memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 30.034 jiwa yang terdiri dari laki-laki 14.576 jiwa dan perempuan sebanyak 15.485 jiwa dan tersebar di 21 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.787 KK dengan batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ajangale
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellu siattinge
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN DUA BOCCOE

Pembentukan SKPD Kecamatan Dua Boccoe tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok SKPD Kecamatan Dua Boccoe

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah.
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Koordinasi dibidang Kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai Tugas :
 - Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
 - Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
 - Membuat usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan Gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
 - Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat Dinas
 - Melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program pendidikan dan pelatihan
 - Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Gedung kantor,

perlengkapan kantor dan asset lainnya

- Menyiapkan penghapusan sarana dan perasarana/perlengkapan/asset
- Melaksanakan pembinaan ASN pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait Tugasnya

4. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai Tugas :

- Melaksanakan mengumpulkan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan penyusunan laporan Tahunan laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja
- Menyiapkan rencana umum pengadaan
- Membuat rencana kerja Tahunan
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan , menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin , melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan Penyelenggaraan Dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan 'kecamatan
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman

akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan

- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
 - Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlakun
 - Membuat evaluasi pelaporan kemandirian penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
 - Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian program dan keuangan
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi perbendaharaan pembukuan, keuangan dan pelaporan keuangan
 - Menyiapkan bahan ltanggapan pemeriksaan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub program dan keuangan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.
5. Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
- menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
 - menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga

kemasyarakatan lainnya;

- memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
 - memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan
 - pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi
 - Pemerintahan dan kependudukan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :
- menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

- melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
 - memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam:
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
 - memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.
8. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
- memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan

- melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

b. Fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi SKPD Kecamatan Dua Boccoe yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

Menetapkan jadwal kegiatan yang terpadu dan sistematis sehingga pelaksanaan tugas yang mendesak dan Proritas dapat tercapai secara progress yang telah direncanakan.

1. Memberi ruang terhadap tugas-tugas yang mendesak yang harus disesuaikan secara mendadak dalam rangka pengambilan kebijakan.
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing pemangku Jabatan dikantor Camat Dua Boccoe..
3. Mengembangkan Budaya Kerja disiplin, Konsultatif, Koordinasi dan Memegang Tegus Rasa Tanggung Jawab Sebagai Kesatuan Unit Kerja.

4. Pencapaian dengan Mekanisme dan sitem yang sesuai dengan Prosedur dalam memberikan Pelayanan Administratif kepada Pimpinan Daerah.
5. Pembagian Tugas dengan sistem bagi hasil sesuai Struktural Jabatan tetapi dalam pengendalian terpadu.
6. Mengupayakan Kesejahteraan Aparat dan Pemberian Motivasi Melalui Konsistensi kinerja yang dihasilkan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut :

a. CAMAT

b. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Analisis Kepegawaian
- Pengadministrasian Umum
- Pengadministrasian Kepegawaian

c. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- Pengelola Gaji
- Bendahara Gaji
- Pengadministrasian Perencanaan dan Program

d. KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- Pengadministrasian Kependudukan
- Pengadministrasian Pemerintahan
- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah

e. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Analisa Keamanan
- Pengadministrasian Umum

f. KASI PEMBANGUNAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

- Analis Pemberdayaan MAsyarakat
- Pengadministrasian Umum

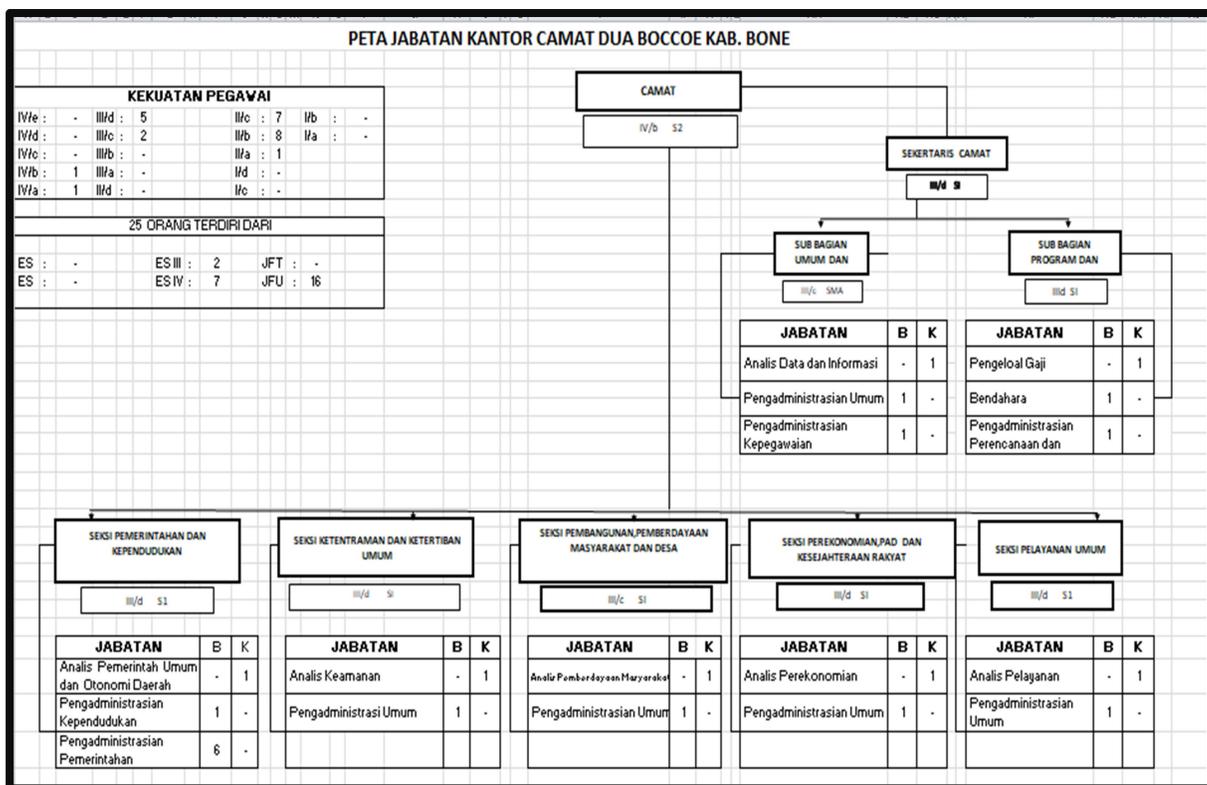
g. KASI PEREKONOMIAN,PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Analis Perekonomian
- Pengadministrasian Umum

h. KASI PELAYANAN UMUM

- Analisa Pelayanan
- Pengadministrasian Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Dua Boccoe

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Pengadministrasian Kepegawaian	1
	- Analisis Data dan Informasi	1
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasian Kependudukan	1
	- Pengadministrasian Pemerintahan	6
	- Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-
	- Analisis Keamanan	-
	- Pengadministrasian Umum	1
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
	- Analisis Pemberdayaan Masyarakat	-
	- Pengadministrasian Umum	1
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1
	- Pengadministrasian Umum	1
	- Analisis Perekonomian	-
9	KASI PELAYANAN UMUM	1
	- Pengadministrasian Umum	1
	- Analisis Pelayanan	-
JUMLAH		24

1.6 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN DUA BOCCOE								
NO	JENIS PENDIDIKAN	JML	NO	GOL.	JML	NO	JABATAN	JML
1	SD	-	1	I		1	STRUKTURAL	24
2	SMP	-	2	II	16	2	FUNGSIONAL	
3	SMA	14	3	III	6			
4	DIPLOMA 1	-	4	IV	2			
5	DIPLOMA 2	-						
6	DIPLOMA 3	-						
7	STRATA 1	8						
8	STRATA 2	2						
JUMLAH		24	JUMLAH		24	JUMLAH		24

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dua Boccoe untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone maka VISI Kecamatan Dua Boccoe Sebagai berikut yaitu :

“ KANTOR CAMAT DUA BOCCOE SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERDAYA SAING DAN MANDIRI “ Visi tersebut mengandung makna :

1. Pusat pelayanan Publik artinya kedepan Kecamatan dua Boccoe diharapkan Mampu menjadi pusat Pelayanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Bagi 22 Desa/Kelurahan yang diawali dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk pemberian Pelayanan yang cepat dan Mudah
2. berkualitas mempunyai artinya Pelaksanaan Pelayanan yang cepat, tepat dan tertib Administrasi serta pelaksanaan yang berdasar pada Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Masyarakat Sejahtera artinya terwujudnya ketersediaan dan peningkatan

sarana dan prasarana fasilitas Umum Pemerintahan hingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, berkemampuan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur, adat istiadat dan Budaya Desa.

4. Berdaya saing dan Mandiri artinya terwujudnya masyarakat yang berkembang dan berdaya saing secara Mandiri melalui Program Perencanaan yang berskala Proritas serta meningkatkan Penanganan masalah sosial, meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial.

2.1.2 MISI:

Dari Uraian VISI diatas selanjutnya dijabarkan sebagai berikut yaitu :

Untuk mencapai VISI dan MISI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diKecamatan Dua Boccoe maka Rumusan MISI Kecamatan Dua Boccoe sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Guna dan Hasil guna Penyelenggaraan Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama kebutuhan Dasar sarana dan prasarana
2. Membina dan mengembangkan kemampuan Lembaga, Sumber Daya Aparat yang berdaya saing kuat untuk kesejahteraan Masyarakat dan pelaksanaan perencanaan pendukung pada sumber-sumber Keuangan Daerah secara Keratif, Optimal dan Akuntabel
3. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berdaya saing dan berwawasan Kemandirian serta berwawasan lingkungan .

4. Mengembangkan mekanisme demokrasi pada tingkat kecamatan dan mengutamakan Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipan

2.1.3 TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Tujuan Penjabaran/Implementasi MISI Kecamatan Dua Boccoe yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan Publik yang berkualitas dan terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik
2. Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur dikecamatan Dua Boccoe
3. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan perda dan Perbub
4. Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat dikecamatan Dua Boccoe.
5. Terwujudnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang berintegritas dan pelaksanaan kewenangan yang Akuntabel.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3

Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Presentase Pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Data	100%	100%
	2. Presentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Data	100%	100%
	2. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	Usulan	39,20 %	40,80 %
2. Terciptanya Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban	Laporan	100%	100%

	masyarakat yang dapat diselesaikan			
	2. Presentase penurunan penyelenggaraan terhadap Perda	Data	100%	100%

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Dua Boccoe
2. Meningkatnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur dikecamatan Dua Boccoe
3. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan perda dan Perbub.
4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga Miskin dan masyarakat dikecamatan Dua Boccoe.
5. Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang berintegritas dan pelaksanaan kewenangan yang Akuntabel

Tabel 2.1.4

Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe
Mengacu Pada RPJMD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
---------	-----------	--------	--------------	----------------------

Sasaran 1	1. Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	ORG	90 %	100 %
Sasaran 2	2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	ORG	85 %	100 %
Sasaran 3	3. Meningkatnya system pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	PAKET	100 %	100 %
Sasaran 4	4. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kel	95 %	100 %
Sasaran 5	5. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DOK	100 %	100 %
Sasaran 6	6. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kualitas Pemerintahan Desa	KEL	85 %	100 %

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program

untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1	Program 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran 2	Program 1 Peningkatan Sarana dan prasarana
Sasaran 3	Program 1 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa
Sasaran 4	Program 1 peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Sasaran 5	Program 1 Perencanaan pembangunan Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. SKPD Kecamatan Dua Boccoe telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
---------	-----------	--------	-------------------

Meningkatkan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik	Presentase Tingkat Ketersediaan Jasa Komunikasi (telepon,Fax,Air dan Listrik	%	100
Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan sesuai dengan Aturan	Presentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	%	100
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase keikutsertaan aparat kecamatan dalam kegiatan rutin Kordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	%	100
Meningkatkan Pelayanan Administrasi perkantoran yang lebih baik	Presentase ketersediaan alat tulis kantor (ATK) barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum sesuai kebutuhan	%	100
Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Presentase pengadaan perlengkapan gedung kantor	%	100
Terciptanya kelancaran penanganan pelayanan perkantoran	presentase pengadaan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana kebutuhan Tahun anggaran	%	100
Terciptanya kelancaran penanganan pelayanan perkantoran	Presentase jumlah pengadaan mobiler lemari arsip, meja kerja, kursi besi	%	100
Meningkatnya pemeliharaan	Presentase pemeliharaan gedung	%	100

gedung kantor	kantor		
Meningkatnya pemeliharaan Kendaraan dinas	Presentase kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin, Roda 4 dan roda dua	%	100
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	Presentase peraturan Desa APBDesa yang telah dievaluasi	%	100
Meningkatnya sistem koordinasi pengawasan lintas sektor yang lebih komprehensif	Presentase peningkatan kordinasi lintas sektor	%	100
Tersedianya alokasi program/kegiatan tepat sasaran kategori kecamatan sehat	Presentase jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan program penurunan kemiskinan dan Kecamatan Sehat	%	100
Terlaksana proses Musrenbang RKPD tingkat kecamatan	Presentase tersedianya Dta dan informasi usulan prioritas Desa/kelurahan	%	100
Terpeliharanya sarana dan prasarana kelurahan unyi	Presentase peningkatan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	%	100
Meningkatkan kinerja Aparatur dan tertibnya pelayanan Administrasi	Presentase peningkatan administrasi kelurahan unyi	%	100

kelurahan unyi			
----------------	--	--	--

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SKPD Kecamatan Dua Boccoe telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 IKU SKPD Kecamatan Dua Boccoe

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Data	Jumlah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibagi jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat dikalikan 100%	Data Pelayanan
	2. Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Laporan	Jumlah pengaduan pelayanan public yang masuk dibagi jumlah pengaduan pelayanan public yang ditindak lanjuti/diselesaikan dikali 100 %	Data Pengaduan Pelayanan
	3. Presentase usulan kegiatan	usulan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan	

	pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui ditingkat kabupaten		masyarakat hasil musrembangcam yang disetujui ditingkat kabupaten dibagi jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab dikali 100%	
4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	kasus	Jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk dikali 100%	Laporan Jumlah gangguan Tramtibmas
	2. Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Kasus	Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1) dikurang jumlah pelanggaran perda Tahun (n) dibagi jumlah pelanggaran perda Tahun (n) dikali 100%	Data laporan pelanggaran perda dan perundang-undangan lainnya

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Dua Boccoe maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar **Rp. 11.738.479.000** dan Setelah Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sebesar **Rp. 11.221.524.895** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.1 Rencana Belanja SKPD Kecamatan Dua Boccoe TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	11.097.334.000	100
2	Belanja Langsung	641.145.000	100
Jumlah		11.738.479.000	100

No	Uraian/Perubahan	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	10.580.379.895	100
2	Belanja Langsung	641.145.000	100
Jumlah		11.221.524.895	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan sebagai pendukung program-program pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
---------	-----------	---------	----------	---------------	---------------------

1. Adminis trasi Perkant oran	Meningkat kan Pelayanan Jasa komunikas i dan Listrik	Pelayanan Administ rasi Perkant oran	Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 3.960.000	100 %
	Pelaksana an Administ rasi keuangan yang sesuai Aturan	Pelayanan Administ rasi Perkant oran	Penyedia an Jasa Administ rasi Keuanga n	Rp.63.667.200	100 %
	Meningka tunya Mutu Pelayana n Administ rasi Perkant oran	Pelayanan Administ rasi Perkant oran	Rapat- rapat Koordina si dan Konsultas i Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 45.000.000	100 %
	Pelayana n Administ rasi perkant oran yang Lebih Baik	Pelayanan Administ rasi Perkant oran	Pelaksana an Adminsit rasi Perkant oran	Rp. 79.979.800	100 %
Peralatan Kantor	Kelancara n Penangan an Pelayana n	Peningkat an Sarana dan Prasarana Perkant oran	Pengadaa n Peralatan Gedung Kantor	Rp. 36. 200.000	100 %

	Perkantoran				
	Kelancaran Penanganan Pelayanan Perkantoran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Mobiler	Rp. 23.400.000	100 %
	Tingkat Pelayanan Administrasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 4.080.000	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 71.760.000	100 %
	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.945.000	100 %
Rencana Kerja Perangkat	Penyusunan Rencana	Penunjang Pemerintah	Penyusunan Rencana	Rp. 15.815.000	100 %

Daerah	Kerja Perangkat Daerah	ahan Umum	Perangkat Daerah		
Rancangan Peraturan Tentang Desa	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Rp. 9.600.000	100 %
Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Meningkatnya Sistem Pengawasan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Rp. 37.500.000	100 %
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 47.601.000	100 %
TOTAL				RP.442,508,000	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.442,508,000 alokasi dana pendukung program indikator kerja utama dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Peralatan Kantor dengan presentase anggaran 100 % Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 100 % persentase anggaran . Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Rancangan Peraturan Tentang Desa sebesar 100 % persentase anggaran dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Kecamatan Dua Boccoe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2013 – 2018. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator

sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	3	BS = - B = 2 SK = - C = - K = 1
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	2	BS = - B = 2 SK = - C = - K = -

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatnya	Persentase	1.952	1.952	100 %

	kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan			
		Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	5	5	100 %
		Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	115	47	54,05 %
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	22	22	100 %
		Presentase penurunan	45	45	100 %

		pelanggaran terhadap Perda			
--	--	----------------------------	--	--	--

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik	2	100
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	1	54,05 %
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	-	-
Sasaran 2			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik	2	100
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 100 % Baik , 1 indikator sasaran atau 54,05 % Kurang.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Dua Boccoe tahun

2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari SKPD Kecamatan Dua Boccoe dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

3.3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SASARAN 1

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
				Kua ntita s Pela yana n Publ ik

1.	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	1.952	1.952	100 %
	Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	5	5	100 %
	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	115	47	40,,80 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 1.952 dari target 1.952 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan dengan capaian **100 %** (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 5 dari target 5 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa dengan capaian **48,80 % (*kurang dari target*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 47 dari target 115 dengan persentase 48,80 % Capaian ini dikategorikan **K (Sangat Kurang)**

3.3.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SASARAN 2

Sasaran 2 : Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
5.	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	22	22	100 %
	Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda	45	45	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 22 dari target 22 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan capaian **100 % (*telah mencapai target*)** yang telah ditetapkan.

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 45 dari target 45 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**

3.3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA SASARAN 1

Tabel 3.3.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1.	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100 %
	Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa	39,10 %	39,20 %	40,80 %

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 40,80 % dari target Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa mengalami (peningkatan) dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 1,67 %

3.3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN

TAHUN SEBELUMNYA SASARAN 2

Tabel 3.3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
2	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda	100 %	100 %	100 %

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 % dari target 100 % mengalami (peningkatan) dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 100 %

3.3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran dan 5 Indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau Kurang dari 100%, yaitu sebanyak 5 *Jumlah Sasaran/Indikator*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 telah mencapai kinerja sebanyak 100 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 100 % dari total anggaran yang dialokasikan. dengan realisasi anggaran sebanyak 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya

adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mendukung mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang	40,80 %	100 %	100 %

		kelurahan/Desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/Desa			
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda	100 %	100 %	100

3.3.6 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.3.6 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi

1.	Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5.760.000	5.760.000	100
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	56.167.000	56.167.000	100
		Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	45.000.000	45.000.000	100
		Pelaksanaan administrasi perkantoran	76.729.800	76.729.800	100
2	Peningkatan sarana dan prasaranan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.250.000	4.250.000	100
		Pengadaan peralatan gedung kantor	31.900.000	31.900.000	100
		Pengadaan mobile	15.500.000	15.500.000	100
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	4.080.000	4.080.000	100

3	Program pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes	7.800.000	7.800.000	100
4.	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	37.500.000	37.500.000	100
5	Perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	66.283.000	66.283.000	100
		Penyelenggaraan MUsrembang RKPD	16.500.000	16.500.000	100

Program dari sasaran ini adalah pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2018 merupakan urusan Pemerintahan wajib Otonomi Daerah, pemerintahan Umum administrasi keuangan Daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2018. Adanya dukungan dana dalam pelaksanaan program kegiatan utama (IKU) dari sasaran dapat dilihat pada tabel diatas yaitu presentase

Indikator sasaran Program Administrasi Perkantoran dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 183.656.800, presentase Indikator sasaran Program Peningkatan sarana dan prasaranan dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 55.730.000, presentase Indikator sasaran Program pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 7.800.000, presentase Indikator sasaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 37.500.000, presentase Indikator sasaran Program Perencanaan pembangunan daerah dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 82.783.00.

3.3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3.3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	1.952	1.952	100 %

2.	Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	5	5	100 %
3.	Presentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	115	47	40,87 %
4.	Prsentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	22	22	100 %
5.	Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda	45	45	100 %

1. presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 1.952 realisasi dengan jumlah 1.952 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di

tahun 2018 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Persentase pada tahun 2018 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepada Masyarakat Yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{jumlah permohonan pelayanan oleh Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\frac{1.952}{1.952} \times 100\% = 100\%$$

Jarak tempuh dan luasnya wilayah secara geografis , sulitnya akses di beberapa wilayah, sarana dan prasarana, keadaan pegawai dan sumber daya manusia (SDM) di kecamatan Dua Boccoe menyebabkan masyarakat terkadang memilih waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan pelayanan di kecamatan dikarenakan hal tersebut .

2. presentase Pengaduan pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 5 realisasi dengan jumlah 5 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2018 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Persentase pada tahun 2018 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk}}{\text{jumlah Pengaduan pelayanan public ditindak lanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Bedasarkan jumlah pengaduan Pelayanan Publik yang Masuk dengan jumlah pengaduan pelayanan public yang ditindak lanjuti sebanyak 5 pengaduan dapat dilihat bahwa proses pelayanan berjalan dengan Baik dengan rendahnya tingkat pengaduan dengan perbandingan luas dan jumlah wilayah Desa 22 Desa/Kelurahan.

3. Persentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan diringkat kelurahan/Desa

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja persentase sebesar 40,80 %. dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 40,80 % yang tertangani dari tahun 2016 - 2018 mengalami mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 1,67 %

Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa

dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa
_____ x 100%

Jumlah usulan kegiatan pembangunan
masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa
dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa

$$\frac{47}{115} \times 100\% = 40,80 \%$$

berdasarkan hasil musrenbangcam pada tahun 2018, dari hasil usulan perdesa hasil musrenbangdes menggagas beberapa usulan yang menjadi skala pereoritas usulan ditetapkan oleh hasil musrenbangdes tadi terdapat 5 usulan dari jumlah Desa yang ada dikecamatan Dua Boccoe sebanyak 22 Desa/kelurahan disini dapat kita lihat berapa jumlah usulan sebanyak 110 usulan ditambah usulan kecamatan sebanyak 5 Usulan . hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ditingkat desa berjalan berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan . hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam dalam menggagas usulan proritas Kelurahan/Desa.

4. Persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan dan presentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya keamanan ketertiban dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja persentase sebesar 22 dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 100 % yang tertangani dari tahun 2016 -2018 mengalami peningkatan capaian kinerja Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja

utama (IKU) mencapai menyerapan 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai Persentase pada tahun 2018 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{jumlah gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{22}{22} \times 100\% = 100 \%$$

ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 2018 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi target yaitu sebelumnya diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat .

5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan Target dengan jumlah 45 realisasi dengan jumlah 45 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2018 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2018 dapat dicapai.

Persentase pada tahun 2018 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1)-}}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun (n)}} \times 100\%$$
$$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$$

Jika capaian berkurangnya jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 201-2018 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi target yaitu sebelumnya diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat .

3.3.7 PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Dua Boccoe kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Dua Boccoe yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk

menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Dua Boccoe akan menjadi perhatian Utama ini dapat dilihat dari Indikator Kerja Utama (IKU) keberhasilan terhadap pelaksanaan program kegiatan akan tetap menjadi perhatian khusus sebagaimana Tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap wewenang yang diberikan kepada kecamatan .

3.4 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.738.479.000,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 11.738.479.000,-
- Belanja Langsung Rp. 641.145.000,-

Jumlah Rp. 11.738.479.000,-

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.738.479.000,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 11.738.479.000,-
- Belanja Langsung Rp. 641.145.000,-

Jumlah Rp. 11.738.479.000,-

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPD Kecamatan Dua Boccoe dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.097.334.000,- (100%) yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai Rp. 11.097.334.000,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 641.145.000.00,- (100%) Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPD Kecamatan Dua Boccoe dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 641.145.000.00,- (100%) yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai Rp. 60.400.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 534.145.000,-

Belanja Modal Rp. 46.600.000,-

4. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 sebagai berikut :

- Penghargaan Musrenbang terbaik 1 (satu) 2018
- Penghargaan operator SIPPD terbaik 3 (tiga)

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun program perencanaan berbasis Pelayanan terpadu sehingga hasil serta target dapat terpenuhi
2. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke Desa/kelurahan yang lebih konperhensif agar tercipta sinkronisasi Data dan informasi

3. Perlunya dilakukan review hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan capaian indikator pendukung Indikator kinerja Utama sebagai dasar pelaksanaan untuk mencapai VISI dan Misi Kecamatan Dua Boccoe
4. Perlunya inovasi pelayanan mengingat luasnya wilayah serta akses menuju ke kecamatan dua boccoe memerlukan waktu serta akses infrastruktur yang belum merata di setiap Desa/kelurahan

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi SKPD Kecamatan Dua Boccoe juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian

tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 4 indikator memenuhi kriteria sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Kecamatan Dua Boccoe untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SKPD Kecamatan Dua Boccoe ke depan. Semakin tingginya tingkat pelayanan yang diharapkan Masyarakat kecamatan dua Boccoe mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang sangat baik sesuai standar prosedur dan kecamatan Dua Boccoe mampu menampung aspirasi tentang peningkatan Mutu Pelayanan yang tak lepas dari Infrastruktur sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih baik .

Kecamatan Dua Boccoe dalam hal ini Camat sebagai pemegang wewenang terhadap pelaksanaan pemerintahan dan urusan pemerintahan mampu mengkoordinasikan dan melaporkan hasil dari kegiatan pelaksanaan di tingkat kecamatan sebagai bahan evaluasi ditingkat Kabupaten

Bagi instansi di lingkungan SKPD Kecamatan Dua Boccoe sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Kecamatan Dua Boccoe untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya.

Mewujudkan Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

SASARAN

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

INDIKATOR

Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Persentase Pengaduan Pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti /diselesaikan

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa

Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

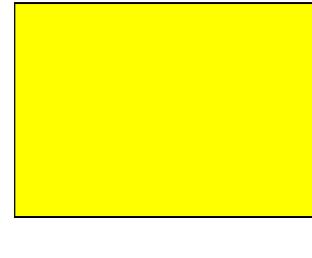
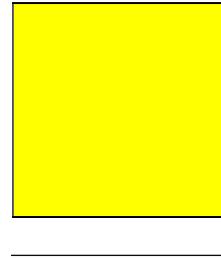
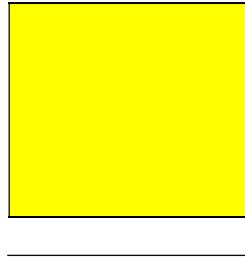
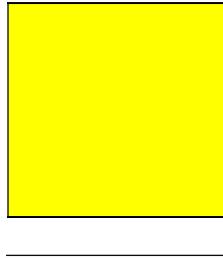
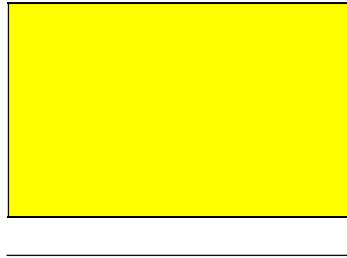
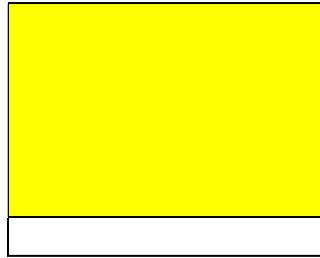
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Penunjang Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan



Kebijakan KDH